

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses dengan tujuan mewujudkan kemakmuran melalui pengembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, daerah maupun sektor dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga bertujuan untuk mengurangi atau mengentaskan masalah kemiskinan, kesenjangan pendapatan, serta masalah pengangguran. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengentaskan masalah kemiskinan merupakan prioritas dari pembangunan (Todaro, 2004).

Kemiskinan menjadi bahan perbincangan nasional maupun internasional. Sebuah kenyataan bahwa pembangunan yang telah dilakukan belum mampu menekan meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Arti kemiskinan muncul disaat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. (Azizah et al., 2018).

Kemiskinan merupakan masalah bagi masyarakat dengan pertimbangan sosial-politik, dan ekonomi. Aspek sosial-politik kemiskinan menggarisbawahi eksklusi sosial dalam masyarakat karena memungkinkan terjadinya marginalisasi suatu sub-kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, secara ekonomi kemiskinan dapat memperlambat proses pembangunan dengan membatasi akses

masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dengan begitu akumulasi modal manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi akan berkurang. Hal ini menciptakan efek negatif yang akan menciptakan ketidakstabilan makroekonomi (Wiriarsa, 2015). Hunter dalam Setyowati dan Rahayu (2020) juga berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya dalam aspek ekonomi. Hal ini meluas ke kemiskinan sosial yang berdampak pada kebodohan, apatis, ketergantungan narkoba, kejahatan, dan maksiat. Hal ini juga dapat menyebabkan kemiskinan spiritual.

Aspek penting yang digunakan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu tersedianya data kemiskinan. Tersedianya data dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Selain itu, data yang tersedia dapat membantu pemerintah untuk membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun (Ferezagia, 2018). Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menghadapi masalah kemiskinan, ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak penduduk miskin yaitu Provinsi Jawa

Tengah. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 tersaji dalam Tabel 1-1.

Tabel 1-1
Jumlah Penduduk Miskin antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2020
(Ribuan Jiwa)

Provinsi	Tahun		
	2018	2019	2020
Banten	661,36	654,46	775,99
DKI Jakarta	373,12	365,55	480,86
Jawa Barat	3 615,79	3 399,16	3 920,23
Jawa Tengah	3 897,20	3 743,23	3 980,90
DI Yogyakarta	460,10	448,47	475,72
Jawa Timur	4 332,59	4 112,25	4 419,10

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1-1 memperlihatkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 3.897,20 ribu jiwa, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3.743,23 ribu jiwa, namun pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 3.980,90 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Jawa Tengah berada dalam urutan kedua kategori penduduk miskin paling banyak di Pulau Jawa pada tahun 2018-2020. Banyaknya penduduk miskin tentu dikhawatirkan akan menghambat pembangunan ekonomi. Dengan begitu, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, terlebih dahulu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah antara lain; PDRB per

kapita, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita serta upah minimum kabupaten/kota.

Menurut Thamrin (Rahayu, 2018) indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angka PDRB per kapita. Angka ini sering digunakan sebagai indikator dari pembangunan. Apabila PDRB per kapita suatu wilayah semakin tinggi, maka semakin besar potensi sumber penerimaan wilayah tersebut, hal ini sejalan dengan pendapatan masyarakat yang semakin besar. Sehingga apabila PDRB per kapita semakin tinggi, maka penduduk akan semakin sejahtera artinya jumlah penduduk miskin akan berkurang.

PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi, tersaji dalam Tabel 1-2. Di tahun 2018 PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah sebesar 27.285,25 ribu rupiah, tahun 2019 meningkat menjadi 28.570,40 ribu rupiah, namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 27.636,72 ribu rupiah.

Tabel 1-2
PDRB per Kapita Jawa Tengah Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah)

Tahun	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah)
2018	27 285,25
2019	28 570,40
2020	27 636,72

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu rata-rata lama sekolah. Menurut Hong dan Pandey (Bintang dan Woyanti, 2018) penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki potensi kecil untuk menjadi miskin. Hal ini dikarenakan pendidikan

merupakan pelopor untuk pembangunan suatu bangsa di masa yang akan datang. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan karena kurangnya pendidikan yang ditempuh. Pendidikan dapat diukur menggunakan rata-rata lama sekolah, yang mana merupakan salah satu komponen dalam pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Safuridar dan Damayanti (2018) bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Namun demikian, studi lain ditemukan dalam penelitian Finkayana dan Dewi (2016) yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Tabel 1-3 memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah selama periode 2018-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 1-3
Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan(Ribu/Orang)
2018	7,35	10 777,00
2019	7,53	11 102,00
2020	7,69	10 930,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1-3 juga memperlihatkan perkembangan dari pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah, dimana pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2018, pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10.777,00 ribu per orang. Tahun 2019, pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Tengah naik menjadi sebesar 11.102,00 ribu per orang. Tahun 2020 turun lagi menjadi sebesar 10.930,00 ribu per orang. Pengeluaran per kapita merupakan

gambaran dari tingkat daya beli masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Finkayana dan Dewi (2016), bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya semakin meningkat pengeluaran per kapita maka akan berdampak pada jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan ketika tingkat pengeluaran perkapita tinggi maka menunjukkan peningkatan kesejahteraan.

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang diduga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yaitu upah minimum kabupaten/ kota. Perkembangan upah minimum kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Tabel 1-4.

Tabel 1-4
Rata-rata per Tahun Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020

Tahun	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
2018	1 686 226,45
2019	1 824 394,55
2020	1 980 784,60

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari Tabel 1-4 memperlihatkan bahwa rata-rata per tahun upah minimum kabupaten/ kota yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat. Menurut Ningrum (2017) upah merupakan sumber penghasilan atau pendapatan, apabila terjadi penurunan maka kesejahteraan akan ikut menurun sehingga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait pengaruh PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah,

pengeluaran per kapita serta upah minimum kabupaten/ kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal mengentaskan masalah kemiskinan untuk membuat kebijakan supaya tercipta kesejahteraan masyarakat, daerah makmur, serta tercapainya pembangunan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana arah dan besarnya pengaruh PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita serta upah minimum kabupaten/ kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020.

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui arah dan besarnya pengaruh PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita serta upah minimum kabupaten/ kota terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2018-2020.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dan strategi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Referensi untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama, serta dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel yang diolah dengan Eviews 9. Metode untuk mengestimasi regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Guna menentukan model estimasi terbaik diperlukan uji kesesuaian model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Setelah mendapat model terbaik, kemudian menentukan uji signifikansi dengan melakukan uji statistik. Persamaan estimasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari jurnal Dewi et al. (2020) dengan judul “*Analisis Determinan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018*”.

Adapun model modifikasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

$$JPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBK_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \beta_3 PPP_{it} + \beta_4 UMK_{it} + \varepsilon_t$$

di mana :

<i>JPM</i>	= Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
<i>PDRBK</i>	= PDRB per Kapita (Juta Rupiah)
<i>RLS</i>	= Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
<i>PPP</i>	= Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah)
<i>UMK</i>	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
ε	= Error term (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
$\beta_0 \dots \beta_4$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Wilayah <i>i</i>
<i>t</i>	= Tahun <i>t</i>

E.2 Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan pengamatan dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, selama tahun 2018-2020, terhadap data jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan upah minimum kabupaten/kota. Data akan diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian secara ringkas yang berisi alat dan model analisis serta data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin, hasil-hasil penelitian terdahulu terkait jumlah penduduk miskin, kerangka berpikir. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan tentang alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yakni uraian mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif.

BAB V PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta bagi penelitian yang selanjutnya.